



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/575/K/411.013/2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- perencanaan jangka menengah;
- perencanaan tahunan;
- penyusunan perjanjian kinerja;
- pengukuran kinerja
- penyusunan laporan kinerja;
- evaluasi kinerja; dan
- pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 19680501 199202 1 001



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/575/K/411.013/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya sumber manusia berkualitas daya yang	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.</p> <p>b. Metode Perhitungan</p> <p>Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:</p> <p>Dimensi kesehatan:</p> $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Badan Statistik (BPS) Pusat	Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan manusia

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Dimensi pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi pengeluaran</p> $I_{Pengeluaran} = \frac{In(Pengeluaran) - n(Pengeluaran)_{min}}{In(Pengeluaran)_{maks} - In(Pengeluaran)_{min}}$ <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometri dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$		

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.</p> <p>b. Metode Perhitungan</p> <p>IKLI diperoleh dari perhitungan komposit layanan infrastruktur, (jalan dan jembatan, perlengkapan jalan, air minum, irigasi, sanitasi, persampahan, drainase, dan ruang terbuka hijau publik), meliputi ketersediaan infrastruktur, kualitas fisik, kesesuaian, efektifitas pemanfaatan, dan kontribusi pada perekonomian.</p>	Survei IKLI	Perangkat Daerah yang membidangi infrastruktur dan kewilayahan	
3.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Kesalehan Sosial (IKS) merupakan Suatu ukuran untuk mengukur sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, meliputi peduli/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), menjaga etika dan budi pekerti, menjaga kelestarian alam/lingkungan, menjaga stabilitas (relasi dengan negara dan pemerintah).</p>	Survei Kesalehan (IKS)	Indeks Sosial	Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, serta pemerintahan umum

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Metode Perhitungan</p> <p>Penghitungan nilai indeks kesalehan sosial dihitung berdasarkan persepsi sikap kesalehan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> $IKS = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} W_i \times skor_{ij}$ <p>Keterangan:</p> <p>i : dimensi ke-i  j : indikator ke-j  <math>k_i</math> : jumlah indikator pada dimensi ke-i  <math>W_i</math> : bobot indikator pada dimensi ke-i  <math>Skor_{ij}</math> : rata-rata skor pernyataan pada indikator ke-j dan dimensi ke-i</p>		
4.	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Tingkat kemiskinan daerah adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.</p>	<p>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS</p>	<p>1) Bappeda  2) Dinas Pendidikan  3) Dinas Kesehatan  4) Dinas PUPR  5) Dinas PRKPP  6) BPBD  7) Dinas Sosial PPPA  8) Dinas Tenaga Kerja</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Metode Perhitungan Tingkat Kemiskinan Daerah dihitung dengan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus:</p> $TKD = \frac{JMP}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>TKD : Tingkat Kemiskinan Daerah</p> <p>JMP : Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu.</p> <p>JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang yang sama.</p>		9) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11) Dinas PMD 12) Dinas PPKB 13) Dinas Perhubungan 14) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 15) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 16) Dinas Pertanian
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	%	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan.</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran</p>	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, yang menunjukkan pertumbuhan positif adanya kenaikan produksi barang dan jasa.</p> <p>b. Metode Perhitungan</p> <p>Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $r = \frac{PDRB_n - PDRB_{(n-1)}}{PDRB_{(n-1)}} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p><math>r</math> = Laju Pertumbuhan Ekonomi</p> <p><math>PDRB_n</math> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke n (nominal)</p> <p><math>PDRB_{(n-1)}</math> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke n-1 (nominal)</p>		

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi mengukur tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Pengukuran indeks ini dilakukan untuk menilai kemajuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi, serta sebagai evaluasi kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional</p> <p>b. Metode Perhitungan</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari hasil perhitungan dari capaian strategi pelaksanaan RB General dan evaluasi pelaksanaan RB Tematik, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Indeks RB} = \text{Nilai RB General} + \text{Nilai RB Tematik}$	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola	
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.</p>	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Metode Perhitungan</p> <p>IKLH menggabungkan beberapa parameter lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ <p>Keterangan:</p> <p>IKA : Indeks Kualitas Air</p> <p>IKU : Indeks Kualitas Udara</p> <p>IKL : Indeks Kualitas Lahan</p>		
8.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator komposit untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan reproduksi yang dibentuk dari proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan proporsi keterwakilan politik sebagai anggota legislatif berdasarkan gender, serta dimensi pasar tenaga kerja yang dibentuk dari tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan.</p>	<p>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>b. Metode Perhitungan</p> <p>IKG diperoleh dengan menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic, dengan rumus sebagai berikut:</p> $IKG = 1 - \frac{HARM(Gp, Gl)}{Gpl}$ <p>Keterangan:</p> <p><i>HARM (Gp, Gl)</i> : agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonis</p> <p><i>Gpl</i> : agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p>		
9.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik</p> <p>b. Metode Perhitungan</p> <p>Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari perhitungan komponen pelayanan publik yang mencakup aspek pelayanan publik, antara lain:</p> <p>1) kebijakan pelayanan;</p>	<p>Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)</p> <p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah</p> <p>Penyelenggara Pelayanan Publik</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>2) profesionalisme SDM;</p> <p>3) sarana dan prasarana pelayanan;</p> <p>4) inovasi pelayanan; dan</p> <p>5) kepuasan pengguna layanan.</p>		
10.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	<p>a. Definisi Operasional</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>b. Metode Perhitungan</p> <p>IKM diperoleh dari perhitungan hasil survei dengan menggunakan metodelogi tertentu berdasarkan indikator dan unsur survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meliputi:</p> <p>1) persyaratan;</p> <p>2) sistem, mekanisme, dan prosedur;</p> <p>3) waktu penyelesaian;</p> <p>4) biaya/tarif;</p> <p>5) produk spesifikasi jenis pelayanan;</p> <p>6) kompetensi pelaksana;</p> <p>7) perilaku pelaksana;</p> <p>8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta</p> <p>9) sarana dan prasarana</p>	<p>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Publik</p>	<p>Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	
11.	Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<p>a. Konsep dan Definisi</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p> <p>Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 (lima belas) tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</p> <p>Pengangguran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan;</li> <li>2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru;</li> <li>3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta;</li> <li>4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</li> </ol> <p>b. Metode Perhitungan</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.</p> <p>Rumus:</p> $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka</p> <p>PP : Jumlah pengangguran (orang)</p> <p>PAK : Jumlah angkatan kerja</p>	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS	Dinas Tenaga Kerja	

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
12.	Meningkatnya kemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	<p>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensi ekonomi budaya;</li> <li>b. dimensi pendidikan;</li> <li>c. dimensi ketahanan sosial budaya;</li> <li>d. dimensi warisan budaya;</li> <li>e. dimensi ekspresi budaya;</li> <li>f. dimensi budaya literasi; dan</li> <li>g. dimensi gender</li> </ul> <p>IPK diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $IPK = \sum_{j=1}^7 Wj \times indeks Dj$ <p>Keterangan:      Wj : bobot dimensi ke-j      Dj : dimensi ke-j</p>	Hasil Evaluasi dan Pengukuran Pembangunan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTIKSONO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI